



**RENCANA KERJA PERUBAHAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
KABUPATEN BALANGAN 2022**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan nikmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, khususnya kepada jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan Tahun 2022 ini dapat terlaksana dengan baik.

Perubahan Renja PD BPBD Kabupaten Balangan didasarkan pada pelaksanaan dan evaluasi Renja PD BPBD Kabupaten Balangan 2022 hingga triwulan II Tahun Anggaran 2022, prioritas RKPD Tahun 2022 dan Renstra BPBD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Perubahan ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja BPBD Kabupaten Balangan pada tahun anggaran yang berjalan.

Demikian Perubahan Renja BPBD Kabupaten Balangan Tahun 2022 ini disusun dengan harapan pembangunan di Kabupaten Balangan dapat berjalan secara tertib dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan..

Paringin, 5 Agustus 2022

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH**



H. RAHMI, S.H.I

Pembina / IVa

NIP. 19761107 198903 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022	6
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Sampai dengan Triwulan II	6
B. Analisis Sosial Ekonomi	9
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD	12
BAB IV PENUTUP	17

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana kerja tahunan.

Sesuai dengan amanat Undang-undang tersebut Kabupaten Balangan telah menyusun RPJP dan RPJM Kabupaten Balangan. Sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Balangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari RPJM Kabupaten Balangan. Renstra BPBD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tupoksi dan bersifat indikatif..

Dokumen akhir dari Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dengan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Di dalam Renja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagai rencana kerja tahunan daerah.

Perubahan Renja BPBD Kabupaten Balangan tahun 2022 disusun berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi capaian program/kegiatan perangkat daerah. Perubahan Renja dilakukan untuk mengakomodir adanya dinamika dalam pelaksanaan kegiatan di lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program lainnya yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan.

B. Landasan hukum

Peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kaliman Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265) ;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang – undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221) ;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Standar Satuan Harga Regional.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;Sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 .
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian , dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Perubahan Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklator Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah .
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2022.
20. Kepmendagri 050 -3708 Tahun 2021Pemutakhiran Tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah .
21. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
24. Peraturan Bupati Balangan Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas BPBD.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 adalah sebagai :

1. Mengkaji RKPD Kabupaten Balangan berdasarkan evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II tahun anggaran berjalan, evaluasi pencapaian target Renstra, usulan masyarakat/ pemangku kepentingan serta kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi.
2. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dalam perangkat daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan r Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan tahun 2022 adalah untuk :

- 1) Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang penanggulangan bencana.

- 2) Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
- 3) Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang penanggulangan bencana.
- 4) Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang penanggulangan bencana.
- 5) Memudahkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan capaian kinerja yang terukur dalam LAKIP, LPPD, dan LKPJ.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Balangan sampai Triwulan II Tahun 2022

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD sampai dengan triwulan II Tahun 2022

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPBD Tahun 2022 sampai dengan triwulan II dapat disampaikan bahwa hasil capaian kinerja 3 Program 12 kegiatan dan 30 Sub kegiatan dengan Indikator :

1. Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah sebanyak 41% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.821.272.975,- (*Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
2. Capaian Program Penanggulangan Bencana 16%; dengan realisasi anggaran sebesar Rp 77.060.451,- (*Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*).
3. Capaian Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran sebanyak 6% dengan realisasi anggaran Rp 33.175.000,- (*Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*). Program dilaksanakan sejak bulan Januari s.d Juni Tahun 2022 dengan realisasi anggaran adalah sebesar 27% atau sebesar Rp. 2.629.508.426,- (*Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*) dari total anggaran tahun 2022 adalah sebesar Rp. 9.866.630.897,- (*Sembilan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*). termasuk realisasi Belanja Tidak Langsung ASN.

Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Triwulan II Tahun Anggaran 2022

Adapun ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan kondisi sampai dengan 30 Juni 2022 BPBD Kabupaten Balangan dapat dilihat sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Keuangan		Persentase (%)
			Anggaran	Realisasi	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	4.492.385.387	1.821.272.973	41
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan keuangan perangkat daerah yang disusun	152.121.112	41.480.000	27
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	152.121.112	41.480.000	27
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.810.855.347	1.437.885.694	51
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.765.092.787	1.428.585.694	52
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun	9.600.000	0	0
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Semesteran	36.142.500	9.400.000	26
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Mendapat Peningkatan Disiplin dan Kapasitas	96.150.000	53.080.000	55
5	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakalan Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan	11.700.000	11.700.000	100
6	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundangundangan	0	0	#DIV/0!
7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	84.450.000	41.380.000	49
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	270.623.600	59.511.900	22
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Diadakan	13.949.400	4.280.000	31
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	167.045.250	3.352.400	2
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	21.930.900	9.385.000	43
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang Disediakan	21.850.000	7.800.000	36
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makanan dan Minuman yang Disediakan dan Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	45.848.000	34.693.600	76

5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan yang diadakan	0	0	#DIV/0!
13	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan	0	0	#DIV/0!
14	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan	0	0	#DIV/0!
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	487.311.572	90.574.782	19
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	274.363.492	34.600.000	13
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.500.000	55.914.782	37
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	60.448.080	0	0
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pelayanan Jasa Pemeliharaan	675.343.850	138.641.499	21
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	272.022.000	102.797.399	38
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	14.250.000	3.875.000	27
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	0	0	#DIV/0!
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	389.071.600	31.968.900	8
11	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase Desa Siaga Bencana, Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana, Respon Time dalam Penyusunan Logistik dan Presentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan	4.783.844.810	775.060.431	16
8	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	209.999.850	10.940.000	5
22	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah berpotensi bencana yang teridentifikasi	109.999.850	3.035.000	3
23	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Presentase Peserta yang Dapat Menjawab 80% Tes dan Jumlah Peserta Apel PRB dan Jumlah Wilayah Berpotensi Bencana yang Mendapatkan Informasi	100.000.000	7.905.000	8
9	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Panjang Bangunan Penahan Longsor Tebing yang Berfungsi	4.283.390.120	731.128.851	17
24	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	343.751.350	51.783.000	15

25	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Dampak Bencana Sebagai Acuan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1.740.525.700	381.171.000	22
26	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Panjang Bangunan Penahan Longsor Tebing yang Berfungsi	168.427.470	34.128.400	20
27	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Posko FBP yang berfungsi	2.040.847.800	264.044.251	13
19	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	280.596.040	32.993.800	12
28	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Menerima Logistik dan Obat-Obatan	280.596.040	32.993.800	12
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana dan Prosentase Desa Siaga Bencana	590.299.000	33.175.000	6
11	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	573.369.000	33.175.000	6
29	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bencana Kebakaran yang Tertangani Tepat Waktu	573.369.000	33.175.000	6
12	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Tersedianya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	16.930.000	0	0
30	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terselenggara nya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	16.930.000	0	0
			9.866.630.897	2.629.506.420	27

B. Analisis Sosial Ekonomi

Dalam Dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai indikator Kinerja Utama “ Menurunnya Indeks Risiko Bencana” dimana untuk mewujudkan hal tersebut BPBD Kabupaten Balangan memiliki program Penanggulangan Bencana, pelaksanaan program penanggulangan Bencana merupakan aktivitas memberikan layanan bantuan penanggulangan kebencanaan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak bencana dengan beberapa tahapan meliputi kegiatan Pra Bencana, Tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana Oleh karena itu keberhasilan pemulihan ekonomi masyarakat dapat ditunjang dengan adanya program Penanggulangan Bencana baik itu faktor Alam ataupun Faktor Non Alam.

22	1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana KabupatenKota (Per jenis Bencana)	Jumlah Wilayah Berpotensi Bencana yang Mendapatkan Informasi tentang Rawan bencana	240 Desa	40.345.190.000	40 Desa	57.910.000	40 Desa	100.000.000	19 Desa	7.905.000	29 Desa	0	29 Desa	7.905.000	72,50	7,91	69 Desa	65.815.000.000	28,75	0,16	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																						
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																						
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																						
Predikat Kinerja (Kegiatan)																						
23	1.05.03.2.02.04	Pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terdapatnya Aparatur Yang menargeti sub urusan bencana dan warga yang berada dibawahi rawan bencana	100 %	267.466.922.423	100 %	2.046.711.300	100 %	2.642.828.120	8 %	201.282.210	17 %	578.031.441	17 %	578.031.441	17,00	21,87	17 %	578.031.441,00	17,00	0,22	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
24	1.05.03.2.02.05	Pengembangan Risiko Bencana KabupatenKota	Jumlah Penyusunan Perhitungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	6 Paket	138.573.800.864	1 Paket	110.615.000	1 Paket	343.751.350	1 Paket	29.483.000	0 Paket	51.783.000	1 Paket	51.783.000	100,00	15,06	2 Paket	162.398.000,00	33,33	0,12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
25	1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana KabupatenKota	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	8 Dokumen	58.281.395.217	1 Dokumen	43.286.000	1 Dokumen	89.999.700	1 Dokumen	3.520.000	Dokumen	381.171.000	1 Dokumen	381.171.000	100,00	43,52	2 Dokumen	424.457.000,00	33,33	1,17	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
26	1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Respon Cepat (TRC) Bencana KabupatenKota	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100 %	79.241.509.959	95 %	1.357.135.300	100 %	168.427.470	0 %	15.184.000	0 %	34.128.400	0 %	34.128.400	0,00	20,26	0 %	34.128.400,00	0,00	0,04	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
27	1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana KabupatenKota	Terdapatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	300 Paket	113.202.518.870	50 Paket	187.088.100	50 Paket	280.596.640	0 Paket	17.710.000	6 Paket	15.483.800	6 Paket	15.483.800	12,00	5,52	96 Paket	203.171.900,00	16,67	0,18	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																						
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																						
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																						
Predikat Kinerja (Kegiatan)																						
1	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rencana Time dalam Penanganan Kecelakaan Bencana dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 %	369.015.880.380	100 %	204.860.000	100 %	590.299.000	66 %	5.320.000	6 %	27.853.000	6 %	27.853.000	6,00	4,72	6 %	27.853.000,00	6,00	0,02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
28	1.05.04.2.01.02	Pembuatan dan Pengiriman Kebakaran dalam Daerah KabupatenKota	Terdapatnya Pengendalian, Pemantauan, Penyelesaian, dan Pengiriman Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah KabupatenKota	30 Kegiatan	362.181.888.000	15 Kegiatan	200.190.000	15 Kegiatan	573.369.000	10 Kegiatan	5.320.000	2 Kegiatan	27.853.000	2 Kegiatan	27.853.000	13,33	4,86	17 Kegiatan	228.045.000,00	18,89	0,14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																						
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																						
29	1.05.04.2.04.01	Pembentukan dan Pengiriman Kebakaran dalam Daerah KabupatenKota	Jumlah Bencana Kebakaran yang Tersempit	30 Kegiatan	362.181.888.000	15 Kegiatan	200.190.000	15 Kegiatan	573.369.000	10 Kegiatan	5.320.000	14 Kegiatan	27.853.000	14 Kegiatan	27.853.000	93,33	4,86	39 Kegiatan	228.045.000,00	32,22	0,14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																						
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																						
1.05.04.2.04	Pembentukan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Terdapatnya Masyarakat Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1200 Orang	6.833.992.300	200 Orang	4.670.000	200 Orang	16.930.000	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	200 Orang	4.670.000,00	16,67	0,07	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																						
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																						
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																						
Predikat Kinerja (Kegiatan)																						
Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)																						
Predikat Kinerja (Program)																						
Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)																						
Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)																						
				Jumlah Anggaran dari seluruh Program				8.216.106.897	1.049.740.133	4.221.597.191	4.221.597.191											
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																						
Optimalisasi peran dan fungsi Satgas Covid Kabupaten Balaen 1. Komitmen dan dukungan pimpinan dan seluruh stakeholder yang terkait penanganan Covid-19 2. Solidaritas Tersejelas yang sudah terbangun dengan baik. Pengabdian sarana dan prasarana dalam penanganan Covid-19. Serta koordinasi kepatuhan yang terdapat dibelakangan subsektor 3. Serta Prologasi Prologi yang sudah cukup terdapat. Mengabdikan Model Damkar untuk 5 Kecamatan 1. Adanya dukungan penuh dari pimpinan daerah																						
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																						
Optimalisasi peran dan fungsi Satgas Covid Kabupaten Balaen 1. Proses Penyediaan Anggaran yang rumit. Pengetahuan sarana dan prasarana dalam penanganan Covid-19. Terbatasnya Ruang Perawatan Pasien Covid-19 di RSUD 2. Belum terdapatnya tenaga kerja khusus sarana pelayanan. Mengabdikan Model Damkar untuk 5 Kecamatan 1. Anggaran tidak mencukupi 2. Belum terdapatnya tim rescue cepat di tingkat kecamatan yang sudah terbentuk dan bersertifikat																						
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya																						
Optimalisasi peran dan fungsi Satgas Covid Kabupaten Balaen 1. Penyeragaman Sistem dan Mekanisme Anggaran. Pengetahuan sarana dan prasarana dalam penanganan Covid-19. Perlu penambahan ruang perawatan pasien Covid-19 yang kompartemend di RSUD 2. Peningkatan ruang tenaga kesehatan pelayanan. Mengabdikan Model Damkar untuk 5 Kecamatan 1. Diutamakan dibagikan 2. perubahan tahun 2022 2. Pembentukan Emergency cepat di tingkat kecamatan yang telah di SK kan oleh camat setempat 3. Diadakan pembinaan dan pelatihan bagi tim rescue kecamatan oleh BPBD																						

Dari tabel hasil evaluasi renja diatas untuk program penunjang urusan pemerintah daerah predikat capaian kinerja kegiatan sangat rendah dengan nilai 32,57 % dan dengan realisasi keuangan 41%, untuk program penanggulangan bencana predikat capaian kinerja kegiatan di posisi sangat rendah dengan nilai 21,75 % dengan realisasi keuangan 16% dan untuk Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran predikat capaian kinerja kegiatan sangat rendah dengan nilai 21% dengan realisasi keuangan 34,61%.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD

Program dan Kegiatan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sekumpulan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi. Perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan untuk Meningkatkan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana;
2. Mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah daerah, baik ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing yang dituntut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Perubahan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Balangan tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi renja hingga triwulan II dan

prioritas program dan kegiatan daerah. Perubahan rencana kerja tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

**TABEL PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2022
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Murni		Perubahan	
			TARGET Capaian Kinerja	Pagu Murni	TARGET Capaian Kinerja	Pagu Perubahan
1.05.01	PELOPOR PENTINGAN URBAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENANDA	Tingkat Kelengkapan Pelayanan Administrasi dan Jasa Perbaikan	100%	4.402.308.301	100%	8.878.941.117
1.05.01.1.01	Pencaharian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan keuangan perangkat daerah yang disusun	3 Dokumen	152.121.113	3 Dokumen	152.121.113
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	152.121.113	5 Dokumen	152.121.113
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kelengkapan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.818.831.347	100%	1.348.757.431
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Daji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Daji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	1.701.081.787	14 Bulan	1.501.014.881
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun	1 Dokumen	8.803.000	1 Dokumen	8.803.000
1.05.01.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trisulanar/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Semesteran	2 Dokumen	36.142.580	2 Dokumen	36.142.580
1.05.01.1.03	Administrasi Kapasitas Perangkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Mengetai Perangkat Daerah dan Kapasitas	100%	96.130.000	100%	181.130.000
1.05.01.2.01.02	Pengadaan Pakelan Dinas Besar/ Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakelan Dinas Besar/ Atribut Kelengkapannya yang Didatarkan	40 Snel	11.700.000	40 Snel	21.700.000
1.05.01.2.01.10	Sosialisai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisai Peraturan Perundangundangan			0	
1.05.01.2.01.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20 Orang	84.450.000	20 Orang	136.450.000
1.05.01.2.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kelengkapan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	270.825.800	100%	898.387.130
1.05.01.2.03.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Didatarkan	12 Bulan	11.940.400	12 Bulan	11.940.400
1.05.01.2.03.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didatarkan	5 Buah	167.045.250	3 Buah	35.1373.830
1.05.01.2.03.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Didatarkan	12 Bulan	21.930.050	12 Bulan	40.186.100

1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perabaran Perundangundangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Perabaran Perundangundangan yang Diakibatkan	12 Bulan	21.850.000	12 Bulan	21.850.000
1.05.01.2.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makanan dan Minuman yang Diakibatkan dan Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	90 Kali	45.848.000	90 Kali	228.838.000
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penyangga Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan yang diakibatkan	12 Bulan	0	12 Bulan	385.500.000
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diakibatkan		0		360.500.000
1.05.01.2.07.04	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perengkapan Gedung Kantor yang Diakibatkan		0		225.000.000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penyangga Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	487.311.573	100%	486.381.768
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Mengurus	Waktu Penyediaan Jasa Surat Mengurus	12 Bulan	274.565.402	12 Bulan	272.520.000
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	152.500.000	12 Bulan	152.500.000
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang diakibatkan	1 Paket	80.448.080	1 Paket	64.181.768
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penyangga Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pelayanan Jasa Per	100%	675.343.656	100%	683.633.816
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	272.022.000	12 Bulan	157.311.000
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan	14.250.000	12 Bulan	14.250.000
1.05.01.2.09.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	12 Bulan	0	12 Bulan	225.000.000
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	389.071.656	12 Bulan	389.071.856
1.05.01	PELOKAN PENAWOLLAHAN BENCANA	Persentase Desa Siaga Bencana, Respon Time dalam Penanganan Bencana dan Bencana, Respon Time dalam Penyelamatan Logistik dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang diperlukan	100%	1.121.422.418	100%	8.886.445.000
1.05.01.01	Pelayanan Informasi Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Informasi Risiko Bencana Kabupaten/Kota	80 Desa	309.086.350	80 Desa	940.893.000
1.05.01.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah bergentengsi bencana yang terpantau	40 Desa	109.990.850	40 Desa	55.530.000

1.05.03.2.01.00	Sosialisai, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Prosentase Peserta yang Dapat Menjawab 80% Tes dan Jumlah Peserta Apel PBB dan Jumlah Wilayah Berpotensi Bencana yang Mendapatkan Informasi	40 desa	100.000.000	40 desa	847.325.000
1.05.03.2.02	Pelayanan Pengawasan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Perangko Bangunan Persehan Longsor Tebing yang Berfungsi	100%	2.942.828.110	100%	3.858.815.418
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	BPBD	1 Paket	341.731.330	1 Paket	1.688.387.510
1.05.03.2.03.05	Pengalihan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Dampak Bencana sebagai Acuan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2 Dokumen	84.990.700	2 Dokumen	1.702.985.700
1.05.03.2.03.07	Perangkoan Pascabencana Kabupaten/Kota	Perangko Bangunan Persehan Longsor Tebing yang Berfungsi	100%	168.427.470	100%	248.303.930
1.05.03.2.03.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pokok PSP yang berfungsi	2 Kegiatan	2.040.647.600	2 Kegiatan	1.711.248.200
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	30 Paket	280.596.640	30 Paket	312.878.618
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Menunggu Logistik dan Obat-Obatan	30 Paket	280.596.640	30 Paket	312.878.618
1.05.04	PROGRAM PENYEDERHAAN, PENYULUHLANAN, PENYULAMATAN KEBAKARAN DAN PENYULAMATAN NON KEBAKARAN	Angka Tawar dalam Perangkoan Kebakaran Bencana dan Prosentase Dasa Sraga Bencana	100%	590.388.000	100%	687.888.000
1.05.04.3.01	Pengawasan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Perangkoan Bahas Berbahaya dan Bencana Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengawasan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Perangkoan Bahas Berbahaya dan Bencana Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15 Kegiatan	573.369.000	15 Kegiatan	573.369.000
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bencana Kebakaran yang Tertangani Tepat Waktu	15 Kegiatan	573.369.000	15 Kegiatan	573.369.000
1.05.04.3.04	Pembudayaan Masyarakat dalam Perangkoan Kebakaran	Tersedianya Pembudayaan Masyarakat dalam Perangkoan Kebakaran	280 Orang	18.800.000	280 Orang	124.370.000
1.05.04.2.04.01	Pembudayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Perangkoan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terselenggaranya Pembudayaan Masyarakat dalam Perangkoan Kebakaran	200 Orang	14.000.000	200 Orang	124.370.000
JUMLAH TOTAL				8.116.306.891		14.343.325.157

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan dengan perencanaan ketersediaan anggaran yang apabila tidak terpenuhi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana akan memakai ketersediaan anggaran Belanja Tidak Tetap (BTT) Pemerintah Kabupaten Malang tahun Tahun Anggaran 2022, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2022 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malang. Dalam rangka mencapai target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, isi dokumen Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2022 sesuai dengan yang dicita-citakan. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rancangan Akhir Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang juga menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Akhir Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Semoga Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Balangan tahun 2022. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Demikian untuk dilaksanakan..

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja BPBD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan PD tahunan daerah yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah RPJMD Kabupaten Balangan. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi BPBD Kabupaten Balangan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2022.